



PRESS RELEASE

NO. 38/HUMAS/XII/2012

PBB AKUI PERAN PARLEMEN INDONESIA DALAM PROSES DAMAI DI ACEH

Peran parlemen Indonesia dalam kelanjutan proses perdamaian di Aceh dinilai oleh PBB sebagai salah satu kisah sukses peran parlemen dalam mengawasi kesepakatan damai antara pihak-pihak yang berkonflik. Hal tersebut dikemukakan oleh Deputi Sekretaris Jenderal PBB, Jan Eliasson, mewakili Sekjen PBB, dalam *Inter-Parliamentary Union (IPU) Annual Parliamentary Hearing* yang berlangsung di Markas Besar PBB, New York, 6-7 Desember 2012.

Jan Eliasson juga menambahkan bahwa peran tersebut dilakukan dengan menyediakan dasar hukum pembentukan lembaga-lembaga sesuai perjanjian damai antara Pemerintah RI dengan GAM. Mekanisme ini dipandang efektif untuk memperkuat kepercayaan publik atas upaya-upaya perdamaian.

Forum tahunan yang diikuti oleh ratusan anggota parlemen dari negara-negara anggota PBB tersebut kali ini mengangkat tema "*A Road Less Travelled: Parliamentary Approaches to Conflict Prevention, Reconciliation and Peace Building*".

Delegasi Indonesia, yang diwakili oleh Roestanto Wahidi dan Puan Maharani dari Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR-RI, telah berbagi pengalaman Indonesia dalam mengatasi konflik internal, serta partisipasi aktif Indonesia dalam upaya mencari solusi konflik di kawasan. Pada kesempatan tersebut, Delegasi DPR RI menegaskan, antara lain, bahwa solusi konflik tidak dapat menggunakan pendekatan "*one size fits all*", perlunya ditingkatkan kepercayaan antar pihak-pihak yang berkonflik, pentingnya mencari akar permasalahan, serta peran wanita dan pemuda harus dioptimalkan.

